

Judul : Evaluasi Total Rutan Teroris
Tanggal : Minggu, 13 Mei 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Evaluasi Total Rutan Teroris

Selain menambah lembaga pemasyarakatan berpengamanan maksimum, pemerintah juga perlu mengevaluasi manajemen pengelolaan narapidana terorisme. Keselamatan petugas, napi, dan masyarakat menjadi pertimbangan.

BOGOR, KOMPAS — Evaluasi total terkait manajemen pengelolaan rumah tahanan kasus terorisme akan dilakukan pemerintah menyusul keributan dan penyanjangan yang terjadi di Rumah Tahanan Cabang Salemba, Markas Komando Brigade Mobil Polri, di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa hingga Kamis (8-10/5/2018). Harapannya, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi pada kemudian hari.

"Harus ada evaluasi total, baik mengenai penjaranya maupun aspek lainnya. Apakah lokasi rutan tetap perlu berada di area Mako Brimob atau di luar. Begitu juga cara pemeriksanya, apakah tetap harus di rutan atau di mana dan seperti apa," kata Presiden Joko Widodo saat ditanya setelah bermain bola basket di halaman Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/5).

Presiden tidak menginginkan peristiwa yang merenggut nyawa lima personel polisi, seorang narapidana kasus terorisme, dan penyerangan terhadap personel Polri oleh simpatisan kelompok teroris itu terulang kembali.

Apalagi, tahun ini akan digelar sejumlah acara internasional, salah satunya Asian Games ke-18 pada Agustus mendatang. Namun, Presiden Jokowi memastikan bahwa situasi keamanan di Indonesia sangat kondusif.

Menurut Presiden, serangan teror seperti di Depok bisa juga terjadi di negara-negara lain yang memerangi terorisme. Hal paling prinsip, tambah Jokowi, adalah menyiapkan diri dari segala kemungkinan untuk mencegah peristiwa seperti itu terjadi lagi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo, dalam siaran persnya, meminta pemerintah segera melakukan proses deradikalisasi terhadap para narapidana terorisme.

"Para narapidana terorisme yang sudah dipindahkan ke Nusakambangan harus deradikalisasi secepat mungkin. Biar bagaimanapun juga mereka adalah

saudara sebangsa kita. Harus dikembalikan ke jalur yang benar supaya mereka tidak salah lagi dalam mengimplementasikan semangat juang, baik dalam beragama maupun berbangsa dan bernegara," kata Bambang.

Perbaikan manajemen

Gatot Goei, peneliti dari Center for Detention Studies, di Jakarta, mendukung langkah Presiden Jokowi untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengelolaan rutan kasus terorisme. Penanganan kasus-kasus terorisme yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena bisa membahayakan keselamatan orang lain, seperti petugas, napi, dan masyarakat lainnya, memerlukan perbaikan manajemen. Penempatan napi berbahaya di lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan pengamanan maksimum bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi risiko ancaman, seperti keributan yang baru terjadi di Mako Brimob.

Menurut Gatot, kasus tersebut membuktikan, napi terorisme tak bisa dicampur atau digabungkan dengan sesama napi dalam kasus serupa karena bisa membuat mereka saling bekerja sama untuk menyerang petugas. Selain itu, napi teroris yang tergolong ideolog juga berbahaya jika ditempatkan di lapas umum karena berpotensi merekrut kader baru dalam aksi terorisme.

"Pemisahan dan penempatan mereka di lapas berpengamanan maksimum sudah tepat karena napi-napi terorisme itu berbahaya bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Pemerintah harus mendorong agar pembangunan lapas-lapas berpengamanan maksimum dilakukan untuk menampung mereka yang bisa membahayakan keselamatan

[Bersambung ke hlm 15 kol 1-3]

Evaluasi Total Rutan Teroris

(Sambungan dari halaman 1)

orang lain,” papar Gatot.

Saat ini, sudah ada dua lapas berpengamanan maksimum di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yakni Lapas Batu dan Pasir Putih. Lapas Batu berkapasitas 96 orang, sedangkan Lapas Pasir Putih 124 orang. Satu sel di lapas tersebut hanya ditempati satu orang. Lapas juga dilengkapi fasilitas pengamanan khusus, seperti fasilitas kamera pengawas dan sejumlah aturan pengetatan, seperti larangan berkunjung bagi orang yang bukan keluarga dan larangan berinteraksi langsung dengan penjenjuk.

Mereka yang ditempatkan di lapas berpengamanan maksimum itu juga hanya bisa bertatap muka dengan dibatasi kaca dan berkomunikasi lewat interkom. Bahkan, napi juga dilarang menerima pemberian apa pun, termasuk dari keluarga.

Sejauh ini, tiga lapas dengan pengamanan maksimum lainnya tengah dibangun, yakni Lapas Kasongan di Kalimantan Tengah, Lapas Langkat di Sumatera Utara, dan Lapas Karanganyar di Nusakambangan. Satu lapas lain juga bisa dikembangkan menjadi lapas berpengamanan maksimum, yakni Lapas Gunung Sindur di Bogor.

Selain pembangunan lapas berpengamanan maksimum, Gatot menambahkan, pemerintah juga harus menata rutan dan lapas yang dikelola oleh pihak lain, seperti kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Rutan-rutan yang dikelola penegak hukum itu pun harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh Kemenkum dan HAM.

“Jika standar penanganan tahanan atau napi terorisme itu

dipisahkan dengan napi lainnya, rutan-rutan yang dikelola penegak hukum lainnya juga harus mengikuti sehingga kerusuhan tak lagi terulang,” ujar Gatot.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sri Puguh Budi Utami mengatakan, penempatan napi terorisme itu untuk mencegah kericuhan atau kerusuhan di lapas yang biasanya dipicu oleh napi-napi berbahaya. Napi-napi berisiko tinggi (*high risk*) harus ditempatkan di lapas khusus agar tak memprovokasi napi lainnya.

Terkait pembangunan tiga lapas berpengamanan maksimum, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkum dan HAM Ayub Suratman mengatakan, pemerintah memberikan perhatian yang lebih untuk pengelolaannya. Pembangunan ketiga lapas tersebut didorong dapat diselesaikan pada tahun ini. Namun, penyelesaian pembangunan amat bergantung pada kesediaan anggaran pemerintah.

“Untuk dua lapas yang direncanakan menjadi lapas *high risk*, yakni di Kasongan dan Langkat, itu belum siap karena sarana dan prasarannya belum memadai atau memenuhi syarat sebagai lapas *high risk*. Adapun untuk satu lapas lainnya yang juga akan dijadikan lapas sejenis, yaitu di Lapas Karanganyar, Nusakambangan, pemerintah menargetkan tuntas pada 2019,” kata Ayub.

Lapas Karanganyar itu diproyeksikan mampu menampung 500 orang. Pembangunan lapas-lapas berisiko tinggi itu dilakukan sebagai respons pemerintah terhadap kejahatan luar biasa, seperti terorisme serta narkoba dan obat-obatan terlarang.

“Karena kejahatannya *extraordinary*, penanganannya pun

harus *extraordinary*. Oleh karena itu, pembangunan lapas berpengamanan maksimum akan dioptimalkan. Sementara untuk standarisasi lapas dan rutan yang dikelola oleh lembaga lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan BNN, hal itu akan dibicarakan dan dikoordinasikan lagi dengan instansi terkait,” kata Ayub.

Masih asesmen

Sebanyak 145 narapidana teroris yang dipindahkan ke tiga lapas di Nusakambangan hingga kini masih menjalani proses penilaian. Untuk sementara, mereka ditempatkan di lapas Pasir Putih, Batu, dan Besi. Mereka juga masih menjalani isolasi serta masih belum diperbolehkan dikunjungi.

“Saat ini, mereka masih dalam asesmen akhir. Asesmen ini untuk penetapan penggolongan yang benar dan tepat,” ujar Sri Puguh, yang ditemui se usai mengunjungi Nusakambangan.

Menurut Sri Puguh, penilaian dilakukan untuk menentukan kelompok mana yang masih ideolog, kooperatif, dan mereka yang hampir selesai menjalani masa hukuman karena sudah menjalani sebagian pidananya.

Lapas Pasir Putih dan Batu, tambah Sri Puguh, akan digunakan untuk narapidana teroris yang sangat berisiko tinggi, sedangkan Lapas Besi untuk yang sudah kooperatif.

“*One man, one cell*. Kami belum bisa memastikan (jumlahnya) karena terus bergerak. Jadi, ada yang 25 orang (satu sel), ada yang 50 orang, dan ada yang 80-an orang. Ini masih *on-off* dan belum pasti karena masih jalan asesmen,” papar Sri.

Pengamanannya pun melibatkan Detasemen Khusus 88 Polri, Brimob, TNI, serta Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban Nusakambangan. (NDY/REK/DKA)